

**Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi
Pemerintahan Desa
Oleh: I Made Sulandra² dan I Nyoman Mudarya²**

Abstraksi

Kemampuan Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa hendaknya dapat mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Pemberdayaan Aparatur yang mempunyai tujuan untuk peningkatan kemampuan sangat perlu dilakukan. Rumusan masalah penelitian ini: bagaimana kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas Administrasi Pemerintahan Desa, dan Kepatuhan atau kedisiplinan kerja aparat desa dalam pelaksanaan tugas Administrasi Pemerintahan Desa dan Faktor-faktor pendukung dan menghambat pelaksanaan tugas penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Hasil yang dicapai dari penelitian ini bahwa Kemampuan aparat Desa dalam pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan desa kurang efektif, dan kepatuhan atau kedisiplinan kerja aparat desa dalam pelaksanaan administrasi desa masih rendah. Faktor pendukung adalah adanya peraturan tentang administrasi desa dan penghambat pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan Desa adalah masih rendahnya sumberdaya pendukung pelaksanaan tugas administrasi desa. Sarannya adalah Untuk meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan serta peningkatan dukungan dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa hendaknya Pemerintah atasan melakukan : Pembinaan, Pelatihan, Bimtek serta memberikan motivasi kerja serta peningkatan kesejahteraan dari pada aparat Desa.

Kata kunci : Administrasi Pemerintahan Desa, kemampuan perangkat desa.

¹Staf Kantor Camat Gerokgak, ²Staf Pengajar FKIP Universitas Panji Sakti

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional yang multi dimensi, pengelolanya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah bahkan sampai ke tingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Desa merupakan sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dibidang pelayanan, penyedia informasi dan penyimpanan data/arsip dan pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan

Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh.

Dalam rangka mencapai pembangunan yang dimaksud maka segala potensi yang dimiliki bangsa Indonesia perlu dilibatkan, salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah potensi sumber daya manusia yang mampu mengelola potensi yang diperlukan dalam pembangunan.

Administrasi manajemen harus didukung oleh kemampuan manusia dibidang sistem administrasi tersebut karena kemampuan manusia adalah yang paling berperan dalam pencapaian tujuan bangsa Indonesia, bagaimanapun modernnya peralatan tanpa dukungan manusia yang berkualitas seperti yang disampaikan dalam temuan Michael Pirson (2017) bahwa “*more modern form of management (i.e.,... In term human resources)*”, tidak akan berarti apa-apa. Menurut Gorda (1993 : 5) permasalahan dan kelemahan umum dalam administrasi adalah :

“Mendapatkan orang – orang yang cakap, mengatakan kepada mereka apa yang ingin kita capai, menerangkan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan memberikan otoritas kepada mereka dan menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran”.

Oleh sebab itu peranan sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan harus memiliki kemampuan yang optimal dalam melaksanakan tugas administrasi sesuai dengan kedudukannya di dalam organisasi, baik sumber daya manusia yang ada di pusat, di daerah maupun di tingkat desa. Jadi pembangunan nasional yang multi dimensi pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, dari tingkat Pusat Daerah maupun Desa.

Pembangunan daerah Pedesaan sangat luas dan kompleks, yang realisasinya harus berjalan secara terpadu dan terprogram. Kompleksnya masalah pembangunan lebih dipengaruhi oleh kemampuan aparat pemerintahan dalam bidang administrasi, Kepatuhan/kedisiplinan, informasi dan dokumentasi, semakin baik sistem administrasi pemerintahan desa maka akan semakin efektif dan efisien pula pelaksanaan pembangunan di desa bersangkutan, begitu pula sebaliknya pembangunan akan sia-sia apabila administrasi tidak terlaksana dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suryaningrat (1992:108) yang mengemukakan bahwa:

“ Desa sebagai bahan keterangan dan sumber data dan bahkan keterangan yang diperoleh dari desa sering kali digunakan untuk rencana daerah, oleh karena itu data buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena dapat mengagalkan tujuan Negara”.

Oleh karena itu peranan aparat desa sangat penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan aparat desa yang benar – benar mampu dan dapat bekerja dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab. Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan akan terlaksana secara optimal apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dijalankan sesuai dengan undang – undang yang berlaku, fasilitas desa yang lengkap dan mendukung serta mengetahui strategi – strategi penyelesaian masalah (*problem solving*). Perbekel bukan saja harus memiliki wibawa tetapi harus memiliki kemampuan untuk dapat memberikan pembinaan, serta manajemen para perangkat supaya diperoleh kinerja perangkat yang baik. Azas-azas yang perlu ditetapkan dalam sebuah lembaga, adalah pembagian tugas. Indikator yang harus diperhatikan dalam azas pembagian tugas ini adalah kemampuan dari individu-individu yang disertai tugas. Maka dalam suatu lembaga pemerintahan perlu adanya manajemen pelayanan yang mampu memberikan pelayanan dan penyimpanan informasi yang cepat, tepat dan berdaya guna. Oleh karenanya maka dalam tulisan ini dirumuskan beberapa permasalahan yang ada yaitu :

1. Bagaimanakah kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas Administrasi Pemerintahan di Desa Pemuteran ?
2. Kepatuhan atau Kedisiplinan kerja aparat Desa dalam pelaksanaan tugas Administrasi Pemerintahan Desa

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

2. Kajian Pustaka

Istilah “kemampuan” mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (Cece Wijaya, 1991:3) berpendapat bahwa “Kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan”. Sementara itu Kartono (1993: 13) bahwa “Kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa”. Lebih lanjut Syarif (1991: 8) menyebutkan beberapa jenis kemampuan yang antara lain: kecerdasan, manganalisis, bijaksana, mengambil keputusan, kepemimpinan/kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan.

Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas maka dalam suatu organisasi pemerintahan Desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas – tugas dan fungsi masing – masing aparat Desa. Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya. Kemampuan kerja seseorang menurut Tjiptoherianto (1993 : 36) megemukakan bahwa “ Kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, kurangnya pembinaan dari pemerintah atasan, serta rendahnya derajat pengalaman yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut di atas jelas bahwa kemampuan seseorang, dalam hal ini aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan, jenis latihan yang pernah di ikuti, Pembinaan, dan pengalaman yang dimilikinya. Secara konsepsional hal ini diperkuat dari pandangan sterss tersebut sebelumnya bahwa untuk mengidentifikasi apakah kegiatan dalam organisasai dapat mencapai tujuan salah satunya yang harus mendapat perhatian adalah orang – orang yang ada dalam organisasi tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kemampuan Aparat Desa dalam pelaksanaan tugas Administrasi Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan rumusan tersebut, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 memposisikan desa pada level yang sangat setrategis dibandingkan dengan produk perundang-undangan sebelumnya, karena otonomi yang dimiliki oleh desa diakui.

Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi perbekel dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas – tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas–tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilaksanakan sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari tidak tersedianya data yang akurat dan dokumen yang lengkap serta tidak terealisasinya seluruh tugas dan fungsi yang diharuskan. Ketidakmampuan aparat dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengalaman, dan diklat yang pernah di ikuti serta faktor disiplin dari pada aparatur desa. Oleh karenanya pemberdayaan aparat perlu mendapatkan perhatian kusus oleh Perbekel bersama dengan Pemerintah atasan baik Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat. Hal ini didukung oleh hasil

temuan berikut, bahwa “pejabat senior harus memperhatikan dan melakukan pengawasan terhadap “*human resources*” yang ada di bawahnya (Qaribov & Huseyn 2017: 106). Hal yang sangat perlu mendapatkan perhatian adalah pemberdayaan dari pada aparat itu sendiri. Karenanya pemberdayaan aparatur merupakan suatu upaya dari pada peningkatan kemampuan dan kualitas aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan pendapatnya Prijono dan Pranaka yang dalam bukunya menyatakan bahwa Pemberdayaan adalah :

“Suatu strategi untuk memperbaiki sumber daya manusia dengan pemberian tanggungjawab dan kewenangan terhadap mereka yang nantinya diharapkan dapat memungkinkan mereka mencapai kinerja yang lebih tinggi di era yang selalu, dan cepat dalam perubahan” (Prijono dan Pranaka,1996: 121).

Komponen utama dalam pemberdayaan yang dimaksud adalah keseluruhan anggota dari pada aparatur pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Pendapat lain yang mengemukakan teori Pemberdayaan adalah oleh “Cook dalam Makmur , 2007: 119 yaitu tentang pemberdayaan terutama bagi anggota Organisasi sebagai berikut “

“Alat yang utnuk memperbaiki kenerja,mulai dari tingkat Pimpinan tertinggi sampai kepada tingkat bawahan oprasional dalam organisasi. Setiap individu yang memiliki keberdayaan akan mampu menciptakan wajah warna organisasi, serta akan mendapatkan kehormatan dan kepercayaan masyarakat” (Makmur, 2007 : 119).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebagai alat untuk mendapatkan kehormatan dan kepercayaan dalam suatu organisasi dan mampu menciptakan wajah dan warna baru dalam organisasi sehingga hasil dari kinerja dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Namun dalam rangka pemberdayaan aparatur desa dan masyarakat, tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan desa saja, akan tetapi seluruh pemangku kepentingan di desa harus terlibat, baik aparatur desa, tokoh masyarakat, swasta pendukung pembangunan desa dan partisipasi masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat Gede Sandiasa dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, bahwa “*to achieve the effectiveness of community empowerment there should be community involvement, government, non-governmental organizations and*

private parties. programs are based on community aspirations” (Sandiasa & Widnyani, 2017: 64).

3.2. Faktor Kepatuhan atau Kedisiplinan Kerja Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Desa.

Berdasarkan hasil Pengamatan dan wawancara yang dilakukan terhadap aparat Pemerintahan Desa tentang Kepatuhan dan Kedisiplinan kerja Aparat Desa masih sangat kurang, di lihat dari segi ketepatan waktu kehadiran masuk kantor kerja sering terlambat dan terkadang tidak masuk kantor dengan tanpa alasan yang jelas, oleh karenanya pemberdayaan terhadap aparatur Pemerintahan Desa sangat diperlukan untuk mendapatkan aparatur yang patuh dan taat, serta disiplin terhadap peraturan yang ada dan terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Kepatuhan dan kesadaran aparatur terhadap peraturan yang ada atau peraturan yang telah ditetapkan dapat di patuhi dengan semestinya, tujuannya agar dapat terciptanya aparatur yang lebih baik dari sebelumnya dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi sehingga norma-norma yang telah ada dapat menjadi acuan dalam pergaulan aparatur. Komponen utama Pemberdayaan yang dimaksud dalam menjalankan roda pemerintahan. Tujuan dan makna dari pemberdayaan ini meliputi :

1. Menciptakan kemandirian dan kepercayaan diri anggota organisasi, pemerintah, maupun anggota masyarakat. Kepercayaan diri dan kemandirian dalam menghadapi berbagai hambatan atau tantangan hidup dapat melahirkan kekuatan dan ketahanan diri untuk menggantungkan harapan kepada pihak lain.
2. Memiliki kegesitan dan proaktif, pemberdayaan manusia menciptakan kegesitan memiliki daya dorong untuk proaktif mencari kegiatan yang dapat lebih menguntungkan.
3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, pengetahuan merupakan sumber keterampilan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang hasilnya lebih menguntungkan.
4. Kepatuhan dan kesadaran, kehidupan manusia senantiasa diatur oleh suatu ketentuan hidup yang perlu ditaati dan sekedar untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan, baik dalam melakukan kegiatan maupun dalam pergaulan. Kepatuhan dan kesadaran terhadap norma-norma sebagai fundamental kehidupan bermasyarakat, berorganisasi dan sebagainya menjadi terapi yang sangat tepat serta mosaic dalam upaya meningkatkan perberdayaan, baik pada diri sendiri maupun orang lain. (Makmur, 2007: 120-121).

Berdasarkan definisi di atas, pemberdayaan haruslah dapat menciptakan kemandirian dan kepercayaan akan kemampuan yang dimiliki oleh setiap aparatur. Aparatur Sekretariat Desa juga dapat melakukan kegiatan dengan cepat dan proaktif dalam melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan. Selain itu, aparatur memiliki pengetahuan yang luas akan perkembangan zaman dan terampil dalam berbagai bidang sehingga hasilnya dapat menjadi lebih baik dari hasil yang sebelumnya.

Dengan demikian Pembinaan serta peraturan yang memuat tentang kepatuhan, dan kedisiplinan kerja perlu diadakan, guna menjadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang menjadi tanggungjawabnya.

3.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil Pengamatan dan Wawancara kepada aparat Pemerintahan Desa bahwa yang merupakan Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas Administrasi pemerintahan Desa adalah adanya beberapa faktor yaitu :

- a. Faktor Perangkat Lunak yang dimaksud perangkat lunak adalah tersedianya Aturan/petunjuk/pedoman tentang pengisian buku-buku register
- b. Perangkat keras yang dimaksud adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti komputer, kantor, listrik, meja kursi dll.
- c. Faktor pendidikan faktor ini sangat memegang peranan sangat penting karena semakin tinggi pendidikan maka tingkat pemahaman akan tugas dan fungsi semakin besar. Dengan kata lain bahwa dengan faktor pendidikan yang rendah dapat menghambat kemampuan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Faktor disiplin yang dimaksud dalam uraian ini adalah ketepatan dan kepatuhan waktu setiap aparat terhadap waktu tupoksi disiplin yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang efisien dan berdaya guna dan sebaliknya disiplin yang rendah menghasilkan kinerja kurang efisien dan kurang efektif sehingga akan terkesan lamban.

- e. Faktor pengalaman, pembinaan, pelatihan, bimtek yang dimaksudkan faktor ini adalah semakin besar pengalaman, bimtek, pelatihan, dan pembinaan yang didapat oleh aparatur desa akan semakin besar kemampuan yang didapat dan sebaliknya semakin kecil pembinaan pengalaman dan bimtek yang didapat akan berpengaruh pada peroses kerja
- f. Faktor kondisi kerja, kondisi kerja yang dimaksud dalam uraian ini adalah keadaan kerja yang dapat mendorong seseorang dapat mengaktualisasikan potensi dan menampilkan pekerjaan secara baik.

4. Penutup

4.1. Simpulan

Maka berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa simpulan pokok sebagai berikut:

1. Kemampuan perangkat/aparat pemerintahan Desa Pemuteran dalam pelaksanaan tugas administrasi masih rendah. Terlihat pada bukti-bukti yang dapat di lapangan, masih banyak buku-buku untuk pencatatan kearsipan tidak terisi
2. Masih ditemukannya kurang disiplin aparat desa dalam mematuhi/mentaati jam masuk kantor tidak tepat pada waktu yang sudah ditentukan.
3. Peningkatan kemampuan aparat Desa pemuteran dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa yang meliputi :
 - a. Pembinaan disiplin Aparat/Perangkat Desa
 - b. Bimtek/Bimbingan teknik
 - c. Motivasi kerja
4. Peningkatan kemampuan aparat Desa Pemuteran, dikarenakan kondisi pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dibeberapa faktor masih sangat minim. Faktor-faktor yang dimaksud minim adalah faktor keterampilan/kemampuan setiap aparat yang berhubungan dengan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan, masih rendahnya disiplin kerja ditinjau dari aspek ketepatan waktu, serta minimnya bimbingan terhadap aparat desa,

pengawasan dan pengendalian yang tidak efektif serta kerjasama antar aparat masih kurang.

5. Pengadaan faktor pendukung pelaksanaan tugas administrasi utamanya perangkat lunak perlu diadakan guna menjadikan pedoman dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa
6. Faktor pengambat dalam pelaksanaan tugas Administrasi Pemerintahan Desa disebabkan masih rendahnya Sumber Daya Manusianya yang dipengaruhi oleh faktor Pendidikan, Pengalaman, kurangnya pembinaan dan faktor kesejahteraan

4.2. Saran

Untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Desa Pemuteran, khususnya pelaksanaan tugas-tugas administrasi Desa, ada beberapa saran pokok yang dapat dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah atasan utamanya Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten melakukan kegiatan /Pelatihan keterampilan dan BinteK secara menyeluruh bukan saja hanya sekretaris tetapi lebih pada seluruh perangkat desa yang ada termasuk sesuai dengan tupoksi yang mereka bebankan.
2. Sebagai aparat Desa yang telah mengabdikan diri dan diberikan kepercayaan sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan/pelayan publik hendaknya dapat dilaksanakan dengan penuh percaya diri dan iklas tanpa membedakan salah satu golongan dan selalu menempatkan kepentingan Umum di atas kepentingan Pribadi.
3. Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan terhadap penyelenggara pemerintah tingkat desa baik dukungan bimbingan teknik administrasi maupun meningkatkan kesejahteraan dari pada aparat Desa.
4. Hendaknya aparat Desa dalam melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara Pemerintahan desa dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan saling memberikan motivasi dan dedikasi sesama aparat pemerintahan desa yang sama-sama mengemban tugas sebagai abdi masyarakat dan abdi negara

Daftar Pustaka

- Gorda, I Gusti Ngurah, 1993. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Widya Kriya Gema Tama, Denpasar
- Kartono, Kartini. 1993. *Pemerintahan dan Kepemimpinan*. Rajawali Press. Jakarta
- Makmur. 2007. *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara, Jakarta
- Pirson, Michael, 2017. "A Humanistic Perspective for Management Theory: Protecting Dignity and Promoting Well-Being". In *Journal of Business Ethics, Springer Science + Business Media*
- Pranaka, .M.W. dan Vidhandika Moeljarto, " Pemberdayaan (*Empowerment*)", dalam Onny S. Prijono dan A. M. W. Pranaka (eds). 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS, Jakarta
- Qaribov, Asaf , & Afaq Huseyn, 2017. "The Functions Of The State And Improvement Of Public Administration System In Modern Age In The Republic Of Azerbaijan". In *Studia UBB Europaea, LXII, 4, 2017, 95-107*
- Sandiasa, Gede dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, 2017. "Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan". Dalam *Locus Majalah Ilmiah Fisip* Vol 8 No. 1- Agustus 2017, P. 64-78
- Suryaningrat, Bayu. 1992. *Pemerintah dan Administrasi Desa*. Bandung PT Mekar Jaya
- Syarif, Roesli. 1991. *Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan*. Bina Aksara. Bandung
- Tjiptoherianto, Prijono. 1993. *Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Prisma. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Widjaya,Cece, 1991. *Manajemen Pemerintahan*. Rajawali Press. Jakarta